

Analisis Peran Media Sosial Dalam Konflik Israel-Palestina Ditinjau Dari Teori Orientalisme Edward W Said

Beti Dwi Sholehkatina^{1*}, Lutfia Adita Putri Winarta²,
Putri Wijayanti³, Rezki Citra Rahayu⁴

^{1*,2,3,4} Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Malang, Kota Malang, Indonesia

^{1*,2,3,4} Corresponding Author. E-mail: beti.dwi.2207516@students.um.ac.id, lutfia.adita.2207516@students.um.ac.id,
putri.wijayanti.2207516@students.um.ac.id, citrarizky513@gmail.com

Abstrak

Media sosial memiliki peran besar dalam konflik Israel-Palestina sebagai wadah dalam menyampaikan informasi baik berupa fakta maupun doktrin terhadap masyarakat umum. Keberpihakan seorang individu maupun suatu negara dapat tercermin melalui apa yang mereka sajikan dalam media sosial. Dalam konflik Israel-Palestina teori orientalisme oleh Edward W Said dapat dilihat dari Deklarasi Balfour pada 1917 yang diinterpretasikan sebagai manifestasi orientalisme. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis pola-pola orientalis dalam representasi media sosial terhadap Israel dan Palestina. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis konten. Subjek penelitian yang digunakan merupakan masyarakat awam yang mempunyai kekuatan untuk menyampaikan pembelaannya di media sosial. Penelitian ini berfokus pada masyarakat Israel dan Palestina dengan menggunakan media sosial sebagai alat bantu dalam memperoleh data. Hasil penelitian ini adalah orientalisme dalam konflik Israel-Palestina dapat diidentifikasi melalui sejarah, tindakan politik, dan pandangan masyarakat yang sering kali mencerminkan dominasi Barat dan pandangan superioritas terhadap Timur. Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks konflik Israel dan Palestina, peran media sosial menjadi semakin signifikan, dan algoritma dalam platform-platform tersebut dapat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat.

Kata Kunci: Media Sosial; konflik; orientalisme; Israel-Palestina

Abstract

Social media has a big role in the Israeli-Palestinian conflict as a forum for conveying information both in the form of facts and doctrine to the general public. The alignment of an individual or a country can be reflected through what they present on social media. In the Israeli-Palestinian conflict, Edward W Said's theory of orientalism can be seen from the Balfour Declaration in 1917 which was interpreted as a manifestation of orientalism. The aim of this research is to analyze orientalist patterns in social media representations of Israel and Palestine. The method used by researchers in this research is the content analysis method. The research subjects used are ordinary people who have the power to convey their defense on social media. This research focuses on Israeli and Palestinian society by using social media as a tool in obtaining data. The result of this research is that orientalism in the Israeli-Palestinian conflict can be identified through history, political actions and societal views which often reflect Western dominance and views of superiority towards the East. It can be concluded that in the context of the Israeli and Palestinian conflict, the role of social media is becoming increasingly significant, and algorithms on these platforms can play an important role in shaping people's views and attitudes.

Keywords: Social media; conflict; orientalism; Israel-Palestina

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional sejak lama. Awal konflik Palestina dan Israel terjadi pasca Perang Dunia I, di mana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I memberikan janji-janji kepada Arab dan Yahudi yang membuat kedua bangsa ini merasa berhak atas wilayah Palestina dan merasa mendapat dukungan dari Inggris. Konflik ini melatarbelakangi konflik Arab-Yahudi yang berkepanjangan hingga konflik Israel-Palestina. Konflik ini terus berlanjut hingga saat ini, dengan banyak peristiwa penting yang menjadi latar belakang konflik. Konflik ini sangat sensitif dan sulit diselesaikan, dan telah menimbulkan banyak korban jiwa.

Dalam konflik Israel-Palestina, peran media sosial dapat dilihat dari perspektif teori orientalisme oleh Edward Said. Teori orientalisme menyatakan bahwa Barat seringkali memandang Timur (termasuk Palestina) sebagai "lain", dan cenderung menggambarannya dengan cara yang tidak akurat atau bias. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, media sosial dapat memainkan peran dalam menyebarkan narasi dan pandangan yang mungkin terpengaruh oleh orientalisme. Media sosial memungkinkan individu untuk menyebarkan informasi, pandangan, dan opini mereka secara luas. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kedua belah pihak. Misalnya, pengguna media sosial dapat menyebarkan informasi yang memperkuat orientalisme, seperti stereotip atau narasi yang tidak akurat tentang masyarakat Palestina atau Israel. Sebaliknya, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang memperjuangkan keadilan dan pemahaman yang lebih baik tentang konflik tersebut. Dengan demikian, peran media sosial dalam konflik Israel-Palestina dapat dilihat dari perspektif teori orientalisme Edward Said sebagai sebuah wadah di mana narasi, pandangan, dan opini tentang konflik tersebut dapat disebabkan dan dipengaruhi oleh orientalisme. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana media sosial dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman tentang konflik tersebut, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi upaya perdamaian dan pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak.

Berdasarkan realitas tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah terdapat pola-pola orientalis dalam representasi media sosial terhadap Israel dan Palestina dalam konflik tersebut? (2) Apakah terdapat perbedaan dalam representasi konflik Israel-Palestina antara media sosial Barat dan media sosial Timur? (3) Apakah terdapat upaya dari kelompok atau individu tertentu dalam menggunakan media sosial untuk memanipulasi orientalisme dalam konteks konflik Israel-Palestina?

Penelitian mengenai peran media sosial dalam konflik telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Qarayeva dkk., 2021) menjelaskan bahwa media sosial mempunyai peranan dalam membentuk persepsi publik, kemudian penelitian (Bachtiar dkk., 2016) mengenai media sosial mampu memonopoli informasi yang beredar, selanjutnya penelitian (Amalia, 2016) mengenai media sosial bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi media sosial dapat menjadi media atau alat untuk menciptakan provokasi, (Annisia & Putra, 2021) media massa dapat menjadi tempat atau wahana penyebaran konten ekstrimis dan mempengaruhi cara berpikir serta nilai-nilai, bahkan di ruang privasi, kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Santosa, 2016) mengenai media massa juga mempunyai peran yang penting dalam pembentukan opini masyarakat, karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan realitas sosial dengan menyampaikan berbagai informasi dan cara berpikir mengenai perilaku toleran.

Selain penelitian di atas ada beberapa kajian literatur yang membahas mengenai topik ini, antara lain: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Suheri dkk., 2022) menunjukkan hasil bahwa pada konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan, media massa digunakan untuk menggalang dukungan dari Masyarakat agar membela salah satu negara yang berkonflik. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Bachtiar dkk., 2016) menunjukkan hasil bahwa pada konflik antara Amerika dan Azerbaijan, media sosial dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan publik secara global dengan tujuan untuk memihak salah satu negara tersebut. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh (Annisia & Putra, 2021) dengan hasil yang menunjukkan bahwa tantangan bagi negara berkembang, terutama Indonesia, di era globalisasi saat ini adalah banyaknya konten yang dapat memecah persatuan negara berkembang. Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh (Santosa, 2017) memberikan hasil bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampai informasi, melainkan telah menjadi pusat informasi sendiri. Dalam era teknologi informasi, perkembangan media memungkinkan akses bebas dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat terhadap informasi. Keadaan ini dapat menciptakan pemahaman yang beragam di kalangan masing-masing penerima

informasi. Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh (Nathanael dkk., 2022) menunjukkan hasil bahwa Xinhua News memiliki kecenderungan menggunakan bahasa yang bersifat abstrak dan mengusung konsep berita yang menunjukkan upaya dalam konteks perdamaian dan negosiasi.

Banyak kajian mengenai peran media sosial dalam suatu konflik negara seperti konflik antara Israel dan Palestina, Suriah dan Mesir, dan Armenia dan Azerbaijan. Namun, sangat sedikit penelitian yang mengkaji peran media sosial dalam konflik antara Israel dan Palestina dari sudut pandang teori orientalisme oleh Edward W Said. Oleh karenanya, penelitian ini akan menambah kajian mengenai pola-pola orientalis dalam representasi media sosial terhadap Israel dan Palestina dalam konflik yang sedang terjadi saat ini, perbedaan dalam representasi konflik Israel-Palestina antara media sosial Barat dan media sosial Timur, serta menganalisis upaya dari kelompok atau individu tertentu dalam menggunakan media sosial untuk memanipulasi orientalisme dalam konteks konflik.

METODE

Metode yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Pendekatan analisis konten sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengetahui isi suatu dokumen atau data, baik itu teks, gambar, audio, atau bentuk konten lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pengertian atau pemahaman yang lebih detail tentang informasi yang terkandung di dalamnya. Pada penelitian ini peneliti menganalisis konten yang ada media sosial yang berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina mengenai apakah ada doktrin yang diberikan oleh salah satu pihak untuk menekan pihak yang lain. Penelitian ini juga berusaha menganalisis dan mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana peran media sosial dalam konflik Israel-Palestina ditinjau dari teori orientalisme Edward W Said, seperti yang diketahui bahwa konflik dari kedua negara tersebut sedang gencar dibicarakan oleh para aktivis dan umat muslim diseluruh dunia. Informasi tentang konflik kedua negara ini juga sangat riuh dibicarakan di media massa, maka dari itu peneliti ingin mengetahui dampak dan peran dari menyebarnya informasi berkaitan dengan konflik yang sedang terjadi di antara Israel dan Palestina.

Dalam penelitian ini usaha usaha yang dilakukan untuk memperoleh validitas dan kebenaran data, maka data yang akan digali menggunakan teknik pengumpulan data yaitu yang pertama mengidentifikasi sampel dimana peneliti akan mengobservasi berbagai platform media sosial untuk mencari informasi terkait dengan konflik antara kedua negara tersebut, yang kedua mengumpulkan data yang telah diperoleh melalui web scraping, yang ketiga klasifikasi konten atau mengidentifikasi apakah konten yang telah diambil sudah sesuai dengan tema penelitian dan teori yang diambil, yang keempat analisis konten apakah ada atau ditemukan tanda-tanda orientalis menurut Edward di dalam konten tersebut, yang terakhir adalah melakukan validasi sampel dan menyimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Terjadinya Konflik Israel dan Palestina

Awal terjadinya konflik antara Israel dan palestina ini dimulai dengan berakhirnya perang dunia satu, dengan Inggris dan sekutunya perancis yang berhasil mengalahkan The Ottoman Empire atau bisa disebut kekaisaran Utsmaniyah di Timur Tengah dan menguasai wilayah-wilayah yang terbagi untuk dikuasai oleh inggris dan perancis. Hal ini disetujui dengan satu perjanjian rahasia yang bernama Sykes-Picot Agreement, perjanjian ini membagi wilayah-wilayah menjadi beberapa zona yaitu zona A adalah bagian yang dikuasai oleh perancis termasuk Suriah dan

Lebanon. Zona B wilayah yang dikuasai oleh Inggris termasuk palestina dan Mesopotamia yang sekarang lebih dikenal dengan nama Irak. Serta ada zona kepentingan yang akan berada dibawah pengaruh Inggris dan perancis. Wilayah palestina yang berada di bawah kekuasaan Inggris didominasi oleh Orang Arab dan Orang Yahudi menjadi kaum minoritas serta beberapa etnis lainnya. Untuk waktu yang lama meski sering terjadi konflik kedua etnis tersebut tetap hidup berdampingan. Namun di internasiona sedikit ada konflik yang memanas terkait dengan Kaum Yahudi yang menyebabkan komunitas Internasional meminta Inggris untuk mendirikan “rumah” bagi kaum Yahudi di Palestina. Pada tahun 1917 menteri luar negeri Inggris Arthur Balfour mengirimkan sebuah surat kepada tokoh Yahudi Inggris yang bernama Lionel Walter Rothschild dengan mengatakan bahwa akan mendirikan “rumah” bagi para kaum Yahudi di Palestina, surat ini dikenal dengan deklarasi Balfour. Dan diantara tahun 1923-1948 Inggris mendukung perpindahan besar-besaran kaum Yahudi ke Palestina. Tentu saja kedatangan besar-besaran kaum Yahudi ke palestina memicu ketegangan dengan warga setempat karena pada awalnya negara palestina didominasi oleh kaum Arab, sehingga menyebabkan Kaum Arab merasa khawatir akan adanya perubahan demografi ditambah lagi Inggris pada saat itu sudah melakukan penyitaan tanah terhadap masyarakat palestina yang sudah menetap atau tinggal disana dari generasi ke generasi untuk diberikan kepada kaum Yahudi atau kaum pendatang.

Pada tahun 1936-1939 terjadi pemberontakan yang cukup besar oleh para kaum Arab terhadap kolonialisme Inggris dan kedatangan Kaum Yahudi ke palestina, Inggris merespon pemberontakan ini dengan penindasan cukup brutal termasuk penangkapan massal dan penghancuran rumah warga lokal Palestina. Ribuan warga tewas akibat dari pertempuran ini. Tentara Inggris menghancurkan kurang lebih 2000 nyawa dan 108 orang digantung, serta 961 orang dihabisi hidupnya karena dianggap patut dibunuh karena telah melakukan tindakan terorisme. Inggris lalu menggandeng komunitas Yahudi yang baru saja tiba dan dulu merupakan kaum minoritas untuk membentuk kelompok-kelompok bersenjata untuk melawan pemberontakan, dan akibatnya lagi-lagi menghilangkan ribuan nyawa warga palestina.

Pada tahun 1945-1947 dunia digemparkan dengan adanya tragedi the Holocaust yang dimana di benua lain terjadi pembantaian kaum Yahudi secara massal di Jerman, mengetahui bahwa palestina dibawah kekuasaan Inggris tidak sedikit Kaum Yahudi di Jerman mencoba bermigrasi ke palestina. Warga palestina banyak yang menerima para korban tragedi Holocaust namun tidak sedikit juga yang terpaksa menerima. Akibatnya populasi dari kaum Yahudi mencapai 33% dan hanya memiliki 6% tanah di wilayah Palestina. Inggris mengajukan kepada PBB terkait pembagian wilayah, lalu PBB pun mengadopsi resolusi 181 yang menganjurkan pembagian wilayah palestina menjadi negara Arab dan Negara Yahudi sedangkan kota suci Yerusalem dan Betlehem akan ada dibawah naungan PBB. Namun rancangan PBB ditolak oleh Warga Arab karena merasa pembagian ini akan melanggar hak-hak kaum Arab, rancangan PBB juga ditolak oleh para kaum Yahudi karena tidak mendapatkan kota suci Yerusalem. Belum selesai masalah pembagian wilayah pada tanggal 14 Mei 1948 David Ben Gurion yang merupakan ketua Yishuv komunitas Yahudi di Palestina mendeklarasikan berdirinya negara Israel di hadapan 250 undangan di museum Tel Aviv. Sehari setelah mendeklarasikan berdirinya negara Israel kaum zionis memulai operasi militer untuk menghancurkan kota dan desa-desa di palestina untuk memperluas batasan negara yang baru saja dibentuk tersebut, warga palestina menyebut peristiwa ini dengan Nakba yang artinya bencana dalam bahasa Arab. Dalam peristiwa ini 750 ribu warga palestina Arab terusir dan kehilangan tempat tinggal.

Pada tahun 1947-1949 zionis sudah merebut sekitar 78% dari wilayah palestina, sementara 22% sisanya dibagi menjadi yang sekarang bernama west bank dan jalur Gaza. Setelah peristiwa Nakba terdapat 150 ribu warga Palestina tetap tinggal di wilayah yang telah dikuasai zionis hingga 20 tahun kemudian diberikan kewarganegaraan Israel. Pada tanggal 5 Juni 1967 Israel kembali

menduduki sisa wilayah bersejarah di Palestina termasuk jalur Gaza, West Bank, Yerusalem Timur, Dataran Tinggi Golan di Suriah dan Semenanjung Sinai di Mesir. Peristiwa Israel melawan koalisi tentara Arab ini disebut Perang 6 Hari. Pada Desember 1987 warga Palestina melakukan perlawanan massal di jalur Gaza aksi ini dilatarbelakangi sebab ada 4 warga Palestina yang terbunuh saat sebuah truk Israel menabrak 2 mobil Van yang membawa pekerja Palestina, perlawanannya dengan cepat menyebar ke West Bank dimana pemuda-pemuda Palestina melakukan perlawanan dengan melempari tank dan tentara Israel yang lewat dengan batu. Hal ini lah yang awalnya memulai gerakan HAMAS sebuah gerakan yang menentang pendudukan Zionis di Palestina, HAMAS yang memulai gerakan pemberontakan kecil berubah menjadi partai politik. Perlawanan pertama berakhir setelah kesepakatan Oslo ditandatangani pada tahun 1993 dan dibentuknya otoritas Palestina sebuah pemerintahan sementara yang diberikan kekuasaan terbatas di West Bank dan jalur Gaza, namun otoritas Palestina yang seharusnya memberikan jalan bagi pemerintah Palestina menjalankan negaranya di West Bank dan jalur Gaza tidak pernah terjadi. 2000-2004 masih terjadi bentrok sampai di tahun 2005 perlawanan kedua berakhir, pemukiman Israel yang ada di Gaza akhirnya di bongkar. Tentara Israel dan kaum Yahudi meninggalkan wilayah tersebut. Israel yang mengetahui partai Oposisi HAMAS mendapatkan alasan untuk menyerang HAMAS, hingga saat ini Israel telah melancarkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza yaitu pada tahun 2008, 2012, 2014 dan 2021. Serangan yang diluncurkan Israel tidak hanya mengenai Hamas namun juga ribuan warga sipil. 10 Mei 2021 karena perebutan wilayah Yerusalem Timur Israel menyerang kawasan Masjid Al-Aqsa, setelah 11 hari berperang Israel dan Palestina menyepakati gencatan senjata.

Doktrin dan Tanggapan Masyarakat Israel Terhadap Palestina

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti dengan melihat berbagai sumber berita dan video yang tersebar di media sosial. Dengan ini peneliti dapat memberikan beberapa hasil yang telah didapatkan mengenai bagaimana tanggapan masyarakat Israel terhadap masyarakat Palestina dan doktrin apa yang diberikan pemerintahan Israel terhadap masyarakat dalam memandang masyarakat Palestina. Seperti yang diketahui baru-baru ini konflik antara Israel dan Palestina ramai kembali dibicarakan di media massa, ternyata hal ini dilatarbelakangi karena Israel dinyatakan melanggar 2 Pasal Dunia tentang peperangan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Awalnya pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 06.30 Hamas melakukan serangan kepada Israel dengan menembakkan ribuan roket dan Iron Dome Israel gagal menahan serangan ini, sehingga sekitar 1,400 warga Israel tewas serta 4,562 lainnya luka-luka. Hal ini langsung ditanggapi oleh pihak Israel sebagai keadaan waspada perang dan melakukan serangan balik kepada Hamas serta melakukan penyerangan menyeluruh ke daerah Gaza. Namun bukan hanya daerah Gaza khususnya pasukan Hamas, Israel juga menyerang kota Jenin di West Bank yang disana tidak ditemukan pasukan Hamas sama sekali. Israel juga secara spesifik menyerang rumah sakit, sekolah, rumah ibadah dan berbagai fasilitas umum lainnya yang mengakibatkan warga sipil mulai dari balita, anak-anak maupun orang dewasa menjadi korban. Dan dengan ini Israel melanggar konvensi Jenewa yang sudah ditandatangani sendiri oleh pihak Israel. Tidak hanya konvensi Jenewa yang dilanggar oleh Israel, namun juga hukum atau aturan internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Dengan ini Israel telah melanggar 2 pasal.



Gambar 1 Pidato Benjamin Netanyahu (Sumber: youtube Nessie Judge)

120 negara anggota PBB sepakat agar Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata tapi hal ini ditanggapi sebaliknya oleh Perdana Menteri Israel pada saat ini yaitu Benjamin Netanyahu dalam pidatonya seperti yang telah ditampilkan pada gambar di atas, ia mengatakan bahwa negara Israel tidak akan melakukan gencatan senjata karena itu sama artinya mereka menyerah atau mengaku kalah dengan Hamas. Selain itu Benjamin Netanyahu juga mengatakan jika Israel melakukan gencatan senjata itu sama artinya dengan menyerah terhadap teroris dan barbarisme. Dalam pidatonya jelas bahwa Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa masyarakat Palestina merupakan “teroris” dan “barbarisme”.



Gambar 2 Postingan Instagram Gal Gadot (Sumber: Instagram Selegram Gal Gadot)

Hal ini peneliti perkuat dengan adanya salah satu selebriti dan model internasional yang gencar menyatakan dukungannya kepada Israel yaitu Gal Gadot, artis cantik yang lahir di Petah Tikva, Israel 30 April 1985 ini membela negaranya dengan mengatakan bahwa Palestina merupakan negara terorisme, selain itu ia juga membuka donasi bagi warga Israel dan membuat film yang menceritakan serangan Hamas kepada Israel yang bertajuk *Bearing Witness to the October 7th Massacre* namun rumor yang beredar bahwa saat penayangan film tersebut Gal Gadot menggelar acara nonton bareng namun ia sendiri tidak datang saat penayangan filmnya sendiri. Dan diketahui melalui media sosial bahwa Gal Gadot pernah melakukan wajib militer di negara asalnya yaitu Israel.

Kaitan dengan Teori Orientalisme Edward W Said

Edward W Said membagi definisi orientalisme menjadi beberapa macam bidang yang terdiri dari, pertama label akademis. Yang dimaksud label akademis sendiri adalah siapa pun yang melakukan pengajaran tentang dunia Timur akan dianggap sebagai seorang orientalis. Kedua,

pemikiran teori ini didasarkan atas perbedaan epistemologis dan ontologis antara Barat dan Timur. Kemudian yang ketiga, orientalisme didefinisikan secara historis dan material. Singkatnya, orientalisme sebagai gaya Barat untuk menata kembali, mengontrol, dan menetapkan kedudukan mereka terhadap dunia Timur (Badri dkk., 2023). Dalam teori orientalisme yang dikembangkan oleh Edward W. Said, ditegaskan bahwa Barat cenderung memandang Timur, termasuk dunia Arab, sebagai "yang lain" atau "eksotik," dengan menggambarkan dan merumuskan pandangan yang sering dipengaruhi oleh stereotip dan prasangka. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, orientalisme dapat dalam cara Barat, termasuk Israel, melihat dan tersebut Bangsa Yahudi seperti memiliki pacuan untuk maju dan mendeklarasikan diri.

Ketika Resolusi 181 PBB pada 1947 yang berisi mengenai pembagian wilayah Palestina. Dalam pembagian ini dirasa tidak adil karena wilayah bagian Israel sebesar 56% dan sisanya untuk bangsa Arab (Wirajaya, 2020). Selain pembagiannya tidak adil orientalisme memandang bahwa dalam asumsi bahwa Barat dengan mudah dapat menentukan masa depan wilayah tersebut ataupun membagi wilayahnya tanpa memperhitungkan kehendak penduduk asli. Proses pembentukan Israel dan pengusiran besar-besaran warga Palestina selama Nakba mencerminkan orientalisme dalam tindakan kolonial yang merendahkan dan merampas hak tanah dan identitas masyarakat lokal. Hal ini selaras dengan asal usul bangsa Yahudi yang berada di Arab berasal dari daerah bekas pemberontakan NAZI yang bermigrasi ke belahan dunia Timur. Dalam konteks konflik lebih baru, orientalisme dapat dilihat dalam sikap dan tindakan Israel terhadap Palestina. Serangan militer berkepanjangan dan pemblokiran di Gaza, termasuk penyerangan terhadap fasilitas sipil, mencerminkan bahwa Barat yang diorientasikan sebagai Israel memandang dan memperlakukan masyarakat Timur sebagai pihak yang lebih rendah atau harus ditekan karena anggapan Palestina adalah teroris.

Dalam tanggapan masyarakat Israel terhadap konflik, orientalisme dapat tercermin dalam cara pemerintah dan opini publik memandang Hamas dan masyarakat Palestina secara keseluruhan sebagai "teroris" atau "barbar." Pernyataan Benjamin Netanyahu yang menolak gencatan senjata dan menyatakan bahwa melakukannya adalah menyerah terhadap "teroris dan barbarisme" mencerminkan konsep orientalisme yang menyederhanakan dan mendemonisasi pihak Timur. Selain itu, dukungan selebriti Israel seperti Gal Gadot yang menyajikan narasi konflik melalui film dan donasi yang mana dapat dipahami sebagai upaya memperkuat pandangan Barat tentang kebenaran sejarah dan peran Israel dalam konflik ini. Dengan demikian, orientalisme dalam konflik Israel-Palestina dapat diidentifikasi melalui sejarah, tindakan politik, dan pandangan masyarakat yang sering kali mencerminkan dominasi Barat dan pandangan superioritas terhadap Timur.

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, media sosial memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Fenomena orientalisme dalam representasi media sosial terhadap Israel dan Palestina tercermin dalam cara berita, gambar, dan pandangan disajikan. Label akademis orientalis juga dapat ditemukan di dalam media sosial, di mana orang-orang yang memberikan pandangan pro-Israel atau pro-Palestina sering dianggap sebagai orientalis yang mendukung satu pihak. Pemikiran ontologis dan epistemologis orientalisme tercermin dalam cara media sosial Barat dan Timur merespon konflik ini. Barat sering mengambil peran superior dalam narasi dan gambar yang diposting, sementara Timur, terutama Palestina, dihadapkan pada stereotip dan prasangka yang merendahkan. Representasi yang tidak seimbang di media sosial juga mencerminkan orientalisme historis dan material, di mana konflik ini dipahami melalui lensa dominasi Barat.

Dalam representasi media sosial terhadap Israel dan Palestina, media sosial sering kali memperkuat klise dan pandangan stereotip yang menggambarkan satu pihak sebagai yang lebih rendah atau teroris. Perbedaan dalam representasi konflik Israel-Palestina antara media sosial Barat dan Timur juga terlihat. Media sosial Barat cenderung mencerahkan gambar Israel atau meredakan

dampak konflik, sementara media sosial Timur, terutama yang berasal dari wilayah Arab, sering mengekspos penderitaan masyarakat Palestina dan menyoroti ketidakadilan yang dialami. Selain hal-hal tersebut upaya kelompok atau individu tertentu yang menggunakan media sosial untuk memanipulasi orientalisme dalam konteks konflik Israel-Palestina. Propaganda dan narasi yang mendukung satu pihak dapat dengan sengaja disebarkan untuk mempengaruhi opini publik dan mendukung pandangan orientalis tertentu. Dengan demikian, orientalisme tidak hanya tercermin dalam representasi media sosial tetapi juga dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkuat naratif mereka dalam konflik Israel-Palestina. Selebritas Gal Gadot mungkin saja menggunakan kepopuleritasan di media sosial dan menggaet isu ini bisa saja atas kepentingan tertentu yang hanya diketahui atau dimengerti oleh orang-orang yang bersangkutan saja.

SIMPULAN

Pertanyaan penelitian yang diajukan penulis pada awal dalam penulisan ini di antaranya adalah bagaimana peran media sosial dalam konflik israel dan palestina. Penulis menarik kesimpulan bahwa dalam konteks konflik Israel dan Palestina, peran media sosial menjadi semakin signifikan, dan algoritma dalam platform-platform tersebut dapat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat. Algoritma media sosial cenderung memperkuat filter bubble, di mana pengguna cenderung hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Hal-hal yang dapat disebabkan dengan adanya media sosial yang semakin masif antara lain:

1. Filter Bubble dan Pembentukan Opini

Algoritma media sosial, seperti yang digunakan oleh Facebook, Instagram, dan Twitter, cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan pandangan pengguna. Dengan adanya hal ini dapat menciptakan filter bubble yang mana pengguna hanya terpapar pada perspektif tertentu, memperkuat keyakinan yang ada dan mengisolasi mereka dari pandangan alternatif. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, ini dapat menguatkan polarisasi dan ketegangan antara pendukung Israel dan Palestina.

2. Penyebaran Informasi dan Propaganda

Media sosial menjadi platform utama bagi penyebaran informasi dan propaganda. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat menggunakan media sosial untuk menyajikan narasi mereka sendiri dan memanipulasi opini publik. Algoritma yang menyesuaikan konten dengan preferensi pengguna dapat membantu dalam penyebaran pesan yang sesuai dengan sudut pandang tertentu.

3. Efek Viral dan Pengaruh Selebritas

Informasi dan pandangan yang mendukung suatu pihak dapat menjadi viral di media sosial, terutama jika didukung oleh selebritas atau tokoh berpengaruh. Dalam kasus ini, algoritma akan cenderung meningkatkan visibilitas konten tersebut, memperkuat pandangan yang mungkin sesuai dengan orientasi Barat atau Timur.

4. Manipulasi Emosi dan Respons Publik

Algoritma media sosial dirancang untuk memahami preferensi emosional pengguna. Konten yang memicu emosi, termasuk kemarahan atau simpati, dapat mendapatkan lebih

banyak perhatian dan interaksi. Dalam konteks konflik, ini dapat mengarah pada peningkatan ketegangan dan polarisasi antara pihak yang terlibat. Penting untuk diingat bahwa meskipun algoritma media sosial dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat, tanggapan yang kompleks terhadap konflik ini tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, pengalaman pribadi, dan nilai-nilai budaya. Masyarakat perlu menjaga kritisitas dalam mengonsumsi informasi di media sosial dan mencari pemahaman yang holistik untuk mengatasi efek filter bubble dan orientalisme yang dapat terjadi dalam lingkungan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. R. (2016). Propaganda Media Sosial Facebook dan Blog dalam Berkembangnya Konflik di Suriah dan Mesir 2011-2013. *ETTISAL: Journal of Communication*, 1(1), 25-40.
- Amri, M. (2022). Konstruksi Realitas Konflik Israel-Palestina Di Media Online Republika. Co. Id Dan Kompas. Com. *Layar: Jurnal Ilmiah Seni Media Rekam*, 8(1), 31-48.
- Annissa, J., & Putra, R. W. (2021). Radikalisme Dalam Media Sosial Sebagai Tantangan Di Era Globalisasi. *Propaganda*, 1(2), 83-89.
- Bachtiar, A. Y., Perkasa, D. H., & Sadikun, M. R. (2016). Peran Media Dalam Propaganda. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2).
- Badri, B., Ihsanullah, A., & Heriyanti, L. (2023). "The Forbidden Kingdom": Dari Representasi sampai Dependensi Kajian Orientalisme Edward Said. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 12(1), 37-51.
- Margono, V. T. (2023). Pengaruh faktor sistem sosial terhadap perbedaan framing pemberitaan CNN dan Al Jazeera dalam konflik Israel-Palestina tahun 2021.
- Nasution, L. K. (2019). Peran Media Sosial Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama. *Hikmah*, 13(2), 221-240.
- Nurjannah, E. P., & Fakhruddin, M. (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 15-26.
- Qarayeva, L., Yani, Y. M., & Setiabudi, W. (2021). Peran Media Sosial Sebagai Alat Propaganda Dalam Konflik Nagorno Karabakh Antara Armenia Dan Azerbaijan. *Global Political Studies Journal*, 5(2), 160-175.
- Santosa, B. A. (2017). Peran media massa dalam mencegah konflik. *Jurnal Aspikom*, 3(2), 199-214.
- Susanto, F. A. V. (2021). Analisis Isu Konflik Israel-Palestina.
- Wirajaya, A. C. (2020). Penyelesaian Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perampasan Wilayah Palestina di Israel). *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Yusuf, R. I., Malik, S., & Hamson, Z. (2023). Framing Media Online Kompas. com Terkait Isu Palestina Dan Israel. *Jurnal Jurnalisa*, 9(1).
- Nathanael, G. K., Sutowo, I. R. I., & Astuti, W. R. D. (2022). Pandangan Media Massa Tiongkok Terhadap Konflik Rusia Dan Ukraina (Studi Kasus: Xinhua News). *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 256-265.
- Suheri, A., Mantili, M., Rosmawiah, R., & Albert, A. (2022, September). Pengaruh Media Sosial Terhadap Nasionalisme Dan Integrasi Bangsa Di Era Modern. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Pgri Palangka RAYA* (Vol. 1, pp. 327-341)